

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Ackerman, Susana Rose. 2010. *Korupsi dan Pemerintahan, Sebab, Akibat, dan Reformasi*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
2. Agustina, Shinta. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books.
3. Arif, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
4. Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. Makassar: Social Politic Genius.
5. Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
6. Bakhri, Syaiful. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*. Depok: Rajawali Pers.
7. Barama, Michael. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press.
8. Chazawi, Adami. 2017. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
9. Darmodiharja, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
10. Danil, Elwi. 2016. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
11. Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

12. Fatoni, Syamsul. 2015. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
13. Fuady, Munir. 2020. *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
14. Hamzah, Andi. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
15. Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
17. Hieriej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
18. Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Ranggung Offiset.
19. Is, Muhammad Sadi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
20. Ishaq. *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
21. Kaiyanto, Agus. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
22. Kartayasa, Mansur. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik, dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
23. Manulung, Fernando M. 2016. *Legisme, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
24. Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

25. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
26. Mulyadi, Lilik. 2015. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
27. Soekanto, Soerjono dan Sri Mumudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: RajaGrafindo Persada.
28. Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
29. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
30. Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: RajaGrafindo Persada.
31. Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.



## **B. Jurnal**

1. Atmasasmita, Romli. 2012. “Memahami Teori Hukum Integratif”. Jurnal Legalitas Edisi. Volume III. Nomor 2. Desember 2012.
2. Lasmadi, Sahuri. 2010. “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Jilid 2 Edisi 3,
3. Barama, Michael. 2016. “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III. No. 8. Januari-Juni. 2016.

4. Hamzah, Andi dkk. 2006. *Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Tidak diterbitkan.
5. Rusyadi. 2016. “*Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*”, Jurnal hukum Prioritas. Vol 5. No. 2. Manado:
6. Wiriadinata, Wahyu. 2012. “*Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*”, Jurnal Konstitusi. Vol. 9. No. 2, Bandung:

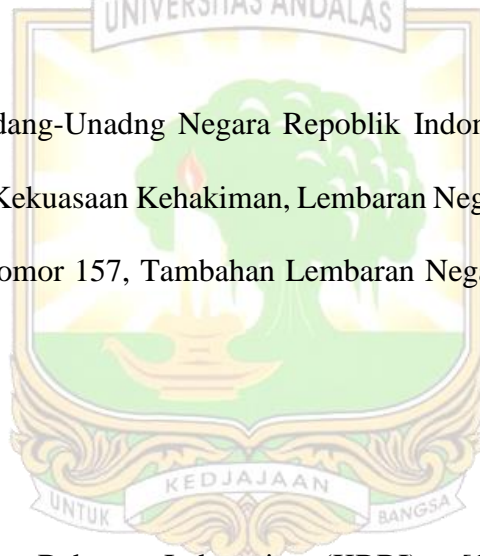
### **C. Skripsi/Tesis/Disertasi**

1. Danil, Elwi. 2001. “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Pembaruan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Depok.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

1. Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

4. Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
5. Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
6. Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.



#### **E. Website**

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
2. Transparency Internasional. [Online]. Diakses dalam [https://www.transparency.org/file/content/pages/2019\\_CPI\\_Report\\_EN.pdf](https://www.transparency.org/file/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf) pada Tanggal 16 Mei 2020 Pukul 23:47 WIB.
3. Transparency Internasional [Online]. Diakses dalam <https://riset.ti.or.id/corruption-perception-index-1999-2019/> dikunjungi Pada Tanggal 7 November jam 20:25 WIB.

## **F. Lain-Lain**

1. Catatan perkuliahan penulis, pada mata kuliah penegakan hukum pidana, yang di ajar oleh elwi danil selaku guru besar bagian hukum pidana universitas andalas, 2020.
2. Catatan perkuliahan penulis, pada mata kuliah Filsafat hukum, yang di ajar oleh elwi danil selaku guru besar bagian hukum pidana universitas andalas, 2019.
3. Catatan perkuliahan penulis, pada mata kuliah Hukum Pidana Korupsi, yang di ajar oleh elwi danil selaku guru besar bagian hukum pidana universitas andalas, 2020.

